

Jakarta - Pelaku industri pengguna gas terus mendesak pemerintah untuk merevisi Permen ESDM Nomor 3/2010 agar industri tidak mendapatkan prioritas pasokan gas paling akhir.

Permen itu mengatur prioritas gas diutamakan untuk peningkatan produksi migas, industri pupuk, PLN, dan terakhir untuk industri.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan walau mendapat prioritas paling terakhir untuk alokasi gas bumi, industri justru mendapatkan volume yang jauh lebih besar dari bidang lainnya.

"Dalam Permen tersebut prioritas utama untuk injeksi menghasilkan minyak, kedua untuk pupuk, listrik lalu industri, tetapi dari sisi volume justru industri mendapatkan pasokan paling besar," katanya usai menghadiri Peresmian penyaluran gas perdana Lapangan Terang Sirasun Bantur, Kangean Energy Indonesia Ltd dan Produksi 100 juta Barel JOB Pertamina-Petrochina East Java (Blok Tuban), Gresik, Jawa Timur, Jumat (22/6/2012).

Ia menuturkan pasokan gas untuk memproduksi minyak tahun ini hanya mendapatkan sekitar 350 bbtud, pupuk mendapatkan 600 bbtud, listrik PLN mendapatkan 800 bbtud, sementara industri mendapat 1.000 bbtud.

"Jadi industri tidak perlu kecil hati, merasa dirinya tidak mendapatkan prioritas, justru industri mendapatkan volume paling besar," katanya.

Memang yang jadi masalah kata Rudi, pasokan gas tidak sesuai dengan kontrak atau kuota gas yang diminta.

"Tapi ini patut disadari karena teman-teman di Industri hulu gas juga sudah berusaha memasok sesuai kontrak, namun ini kita bermain dengan alam, kadang alam tidak bisa ditebak sehingga hasil yang didapat tidak bisa fix," tandasnya. <http://finance.detik.com>